



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**  
**KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

Jln. Prof. Soepomo No. 22 Selong 83612

Telp/Fax.(0376) 21097 [www.kejari-lomboktimur.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-lomboktimur.kejaksaan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

NOMOR : KEP- 27A/N.2.12/Cr.3/01/2025

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

TAHUN 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tentang Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 930);



9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR TAHUN 2025.

**KESATU** : Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025 merupakan lembar atau dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

**KEDUA** : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

- a. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur selaku Pimpinan Satuan Kerja.
- b. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV dibawah Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

**KETIGA** : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 paling sedikit memuat pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dengan ketentuan:

- a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku atasan langsung;
- b. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV Kejaksaan Negeri Lombok Timur ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur selaku atasan langsung.



- KEEMPAT : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud angka 1, 2, dan 3 disusun dalam 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,



HENDRO WASISTO, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 198006282006031001

Tembusan:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
2. Wakil Kepala Kejaksaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
3. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
5. Arsip.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRO WASISTO, SH.MH  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENEN SARIBANON, SH.MH  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 30 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
NUSA TENGGARA BARAT,

(ENEN SARIBANON, SH.MH)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	75
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.027.844.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.435.119.000,-
Jumlah		Rp 10.637.963.000,-

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

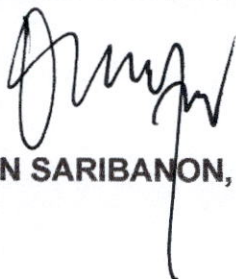
#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selong, 30 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
NUSA TENGGARA BARAT,



(ENEN SARIBANON, SH.MH)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHRUL, SH.  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRO WASISTO, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 30 Januari 2025

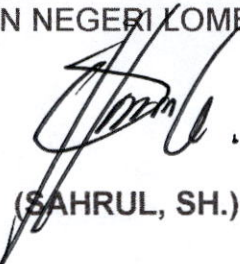
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,

  
(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

  
(SAHRUL, SH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100$	95 %
2	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara	$\frac{\text{Kepatuhan pelporan pada tahap pra penutupan + tahap penuntutan}}{\text{-----}} \times 100$	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
	Teknologi Informasi	Lengkap	2 (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)	

No	Program	Anggaran
1	Layanan umum	Rp. 92.100.000,-
2	Gaji dan Tunjangan	Rp. 7.610.019.000,-
3	Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp. 1.753.000.000,-
Jumlah		Rp. 9.435.119.000,-

#### D. KINERJA TAMBAHAN

No	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRI WASISTO, SH.MH.)

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

(SAHRUL, SH.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I PUTU BAYU PINARTA, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK  
TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRO WASISTO, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,

  
(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

  
(I PUTU BAYU PINARTA, SH.MH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN**  
**KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	Meningkatnya kegiatan pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase kegiatan pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan Pembangunan strategis yang dielesaikan tepat waktu 0 X 100 Surat perintah pengamanan Pembangunan strategis	0 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/ Pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah Penerima penerangan hukum 2 x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum  2. Jumlah penerima penyuluhan hukum 8 x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	100%
3	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu 8 x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	100 %
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu 1 x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	100 %
		Persentase pelaksanaan posko intelijen	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan 40 x 100 Target Kegiatan Posko Intelijen	100 %
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pelacakan Aset yang dilaksanakan 3 x 100 Target Kegiatan Pelacakan Aset	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/ Pencarian (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/ DPO yang berhasil dilaksanakan 1 x 100 Target Kegiatan Pencarian Buronan/ DPO	100 %

No	Program	Anggaran
1	Kegiatan Operasi Intelijen	Rp. 40.000.000,-
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Rp. 58.008.000,-
3	Kegiatan Kampanye Anti Korupsi	Rp. 20.000.000,-
	Kegiatan Penerangan Hukum	Rp. 38.976.000,-
	Penyuluhan Hukum	
	- Jaksa Masuk Sekolah	Rp. 28.000.000,-
	- Jaksa Menjawab	Rp. 24.400.000,-
	Jumlah	Rp. 209.384.000,-

#### D. KINERJA TAMBAHAN

No	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET

Selong, 30 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

(I PUTU BAYU PINARTA, SH.MH.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHRUR RAHMAN, SH.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRO WASISTO, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

(SYAHRUR RAHMAN, SH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang undangan -----x 100 Jumlah Perkara	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
			yang diusulkan melalui keadilan restorative ;berdasarkan peraturan perundang undangan	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan Hukum Tetap pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah di eksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum Tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/ barang rampasan)  ----- x 100  Jumlah putusan perkara tindak pidana umum Tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/ barang rampasan)	100%

No	Program	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp. 8.470.000,-
2	Penuntutan	Rp. 166.980.000,-
3	Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 4.000.000,-
4	Restorative Justice	Rp. 7.720.000,-
Jumlah		Rp. 187.170.000,-

**D. KINERJA TAMBAHAN**

No	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

(SYAHRUR RAHMAN, SH.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN  
NEGERI LOMBOK TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRO WASISTO, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
NEGERI LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

(IDA BAGUS PUTU S DIPUTRA, SH.MH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan Masyarakat pada tahun	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
	Transparan Akuntabel dan Profesional		berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	<p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada Tahap Penyelidikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan pada Tahun Berjalan</p>	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan	<p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada Tahap Penyidikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Tahun Berjalan</p>	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan</p>	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
			<p>----- x 100</p> <p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun Berjalan</p>	
		<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan</p>	<p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada Tahap Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Tahun Berjalan</p>	100%
		<p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah di eksekusi</p>	<p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada Tahap Eksekusi</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Eksekusi pada Tahun Berjalan</p>	100%
		<p>Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Khusus</p>	<p>Jumlah Pengembalian Kerugian Negara</p>	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
			berdasarkan putusan pengadilan yang telah di eksekusi ----- X 100 Jumlah Pengembalian Kerugian Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
3	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU secara Transparan Akuntabel dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan ----- X100 Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan	100 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan ----- X100 Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
			(Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang telah di Eksekusi	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Eksekusi (badan dan barang bukti/ barang rampasan) ----- X100 Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU pada Tahap Eksekusi (badan dan barang bukti/ barang rampasan)	100 %

No	Program	Anggaran
1	Kegiatan Penyelidikan	Rp. 92.082.000,-
2	Kegiatan Penyidikan	Rp. 206.000.000,-
3	Kegiatan Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 141.728.000,-
4	Kegiatan Eksekusi	Rp. 11.080.000,-
Jumlah		Rp. 450.890.000,-

**D. KINERJA TAMBAHAN**

No	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

(IDA BAGUS PUTU S DIPUTRA, SH.MH.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANANTA RIZAL WIBISONO, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRO WASISTO, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,

  
(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

  
(ANANTA RIZAL WIBISONO, SH.MH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil diselesaikan melalui jalur Litigasi -----x 100 Jumlah Perkara Perdata melalui jalur Litigasi	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
		Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	<p>Jumlah Perkara Perdata yang berhasil diselesaikan melalui jalur Non Litigasi</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perkara Perdata melalui jalur Non Litigasi}} \times 100$	100 %
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendampingan Hukum	Persentase Lembaga/ Pihak yang diberi Pendampingan Hukum	<p>Jumlah Penerima Pendampingan Hukum</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah target penerima Pendampingan Hukum}} \times 100$	100%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	Persentase Lembaga/ Pihak Desa yang diberi Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	<p>Jumlah Penerima Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah target penerima Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa}} \times 100$	100%
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendampingan Hukum melalui sarana Halo JPN	Persentase Lembaga/ Pihak yang diberi Pendampingan melalui sarana Halo JPN	<p>Jumlah Penerima Pendampingan melalui sarana Halo JPN</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah target penerima Pendampingan melalui sarana Halo JPN}} \times 100$	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Hukum Gratis	Persentase Lembaga/ Pihak yang diberi Layanan Hukum Gratis	Jumlah Penerima Layanan Hukum Gratis ----- x 100 Jumlah target penerima Layanan Hukum Gratis	

No	Program	Anggaran
1	Kegiatan Pertimbangan/ Pendampingan Hukum	Rp. 13.200.000,-
2	Kegiatan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000,-
3	Kegiatan Penyelesaian Perakara Perdata	Rp. 30.000.000,-
4	Kegiatan Pengelolaan Halo JPN	Rp. 6.000.000,-
5	Kegiatan Layanan Hukum Gratis	Rp. 7.200.000,-
Jumlah		Rp. 80.400.000,-

**D. KINERJA TAMBAHAN**

No	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

(ANANTA RIZAL WIBISONO, SH.MH.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMMAD FAJARUDIN, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN  
BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRO WASISTO, SH.MH.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 30 Januari 2025

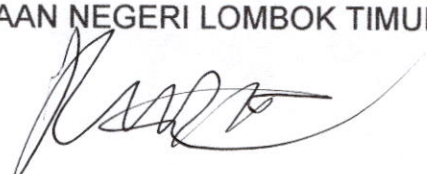
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,

  
(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PB3R  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

  
(MOHAMMAD FAJARUDIN, SH.MH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian, Penyelamatan Aset Negara	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui Lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- X 100</p> <p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui Lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan Lelang dan hasil penelusuran dan pengamanan aset Dalim rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kemekterian/ Lembaga lintas negara -----X 100</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan</p>	<p>100 %</p> <p>100%</p>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
			asset yang berhasil dilaksanakan Lelang dan hasil penelusuran dan pengamanan asset Dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kemekterian/ Lembaga lintas negara	
			Nilai yang disetorkan ke kas Negara dari hasil pelaksanaan Lelang Dalim rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, ----- X100 Nilai yang disetorkan ke kas Negara dari hasil pelaksanaan Lelang Dalim rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya,	100%
			Nilai Barang rampasan , sita eksekusi dan asset yang disetorkan ke kas Negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
			<p>Dalam rangka pemenuhan uang penggnati, denda, pidana tambahan lainnya ----- X 100</p> <p>Nilai uang penggnati, denda, pidana tambahan lainnya Dalam berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht yang masih memilikinhak tagih</p>	

No	Program	Anggaran
1	Pemeliharaan Barang Bukti	Rp. 17.650.000,-
2	Penyelesaian Barang Bukti	Rp. 51.000.000,-
3	Pemusnahan Barang Bukti	Rp. 31.350.000,-
Jumlah		Rp. 100.000.000,-


**D. KINERJA TAMBAHAN**

No	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET

Selong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

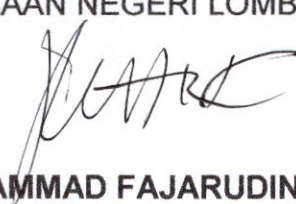
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
LOMBOK TIMUR,



*[Signature]*  
(HENDRO WASISTO, SH.MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PB3R  
KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,



(MOHAMMAD FAJARUDIN, SH.MH.)